

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Seorang aktor politik ketika ingin meraih atau mempertahankan kekuasaan di dalam pemerintahan memerlukan modal yang dapat digunakan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaannya. Menurut Bourdieu aktor politik ketika ingin memiliki kekuasaan memerlukan modal sosial<sup>1</sup>, modal ekonomi<sup>2</sup>, modal kultural<sup>3</sup>, dan juga modal simbolik<sup>4</sup>. Berbagai macam modal tersebut dijadikan kekuatan oleh aktor politik dalam menggalang massa, mendapatkan dukungan politik masyarakat, ataupun meraih kekuasaan melalui pemilihan elektoral seperti pemilihan umum (pemilu), pemilihan kepala daerah (pilkada), ataupun pemilihan kepala desa (pilkades) (Zamzuri Ahmad, 2016).

Kekuatan modal yang disampaikan oleh Bourdieu tersebut, akan dianalisis melalui penelitian yang dilakukan di Desa Sumpinghayu, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap pada kontestasi pilkades selama tiga periode berturut-turut mulai tahun 2007 hingga tahun 2024 ini yang dilakukan oleh aktor politik bernama Sanen yang dianggap sebagai orang kuat lokal, yang mampu

---

<sup>1</sup> Modal Sosial merupakan sebuah kekuatan yang tentunya wajib dimiliki oleh para kontestan politik ketika hendak berlaga dalam pesta demokrasi, karena modal litas sosial merupakan modal politik yang sangat efektif untuk memenangkan kontestasi politik.

<sup>2</sup> Modal Ekonomi yaitu kekayaan yang dapat digunakan untuk melakukan kompetisi politik yang dapat secara signifikan menentukan kemenangan seseorang dalam kontestasi politik.

<sup>3</sup> Modal Kultural yaitu asset sosial yang dimiliki seseorang seperti Pendidikan, gaya bicara, yang dapat membantu seseorang dalam kontestasi politik dan mampu memberi kemenangan pada dirinya.

<sup>4</sup> Modal Simbolik yaitu sumber daya yang berasal dari non material seperti status, kehormatan dan juga pengakuan di dalam masyarakat.

memenangi kompetisi politik lokal. Bahkan kekuatan politik Sanen sebagai kepala desa yang begitu besar dan dominan membuatnya membentuk dinasti politik, karena banyak kerabat beserta keluarga Kepala Desa Sanen dijadikan sebagai perangkat desa dan mendapatkan jabatan strategis di pemerintahan Desa Sumpinghayu<sup>5</sup>.

Berdasarkan kekuatan politik yang dilakukan kepala desa bernama Sanen ini menarik untuk dikaji dalam penelitian ini, apakah kekuasaan Sanen ini sesuai dengan kajian analisis politik yang disampaikan Bourdieu perlu adanya modal - modal yang disampaikan di atas. Bahwa Sanen mampu mengkombinasikan kekuatan - kekuatan modal tersebut atau hanya memiliki sebagian modal saja. Namun harus dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini, apakah kepala desa ini memiliki seluruh aspek kekuatan modal yang disampaikan oleh Bourdieu atau hanya memiliki salah satu dari modal sosial, politik, ekonomi, budaya ataupun simbolik saja dalam menciptakan dinasti politik di Desa Sumpinghayu tersebut.

Modal sosial, ekonomi, budaya, ataupun simbolik memang perlu dimiliki oleh aktor politik, hanya saja modal - modal tersebut seringkali di salah gunakan untuk membentuk pengaruh dan mempertahankan kekuasaan, sehingga dalam jabatan politik di dalam sebuah pemerintahan menempatkan anggota keluarga dalam struktur jabatan pemerintah adalah salah satu cara untuk menciptakan dinasti politik. Kekuasaan dalam membentuk dinasti politik sendiri yaitu upaya untuk mempertahankan kekuasaan dari satu garis keluarga yang berlangsung secara terus menerus atau berkala dan berlanjut dari satu periode kekuasaan dan dilanjutkan oleh

---

<sup>5</sup> Data di peroleh dari struktur pemerintah desa Sumpinghayu Tahun 2024

keluarga lainnya untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan, hal ini membuat suatu sistem politik yang melingkar dan terus menerus (Nur rahmah & Maulia, 2024). Praktiknya kekuasaan yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang di dalam pemerintahan baik tingkat pusat ataupun daerah melahirkan elite - elit politik baik dalam skala nasional ataupun lokal yang menguasai berbagai sumber daya modal yaitu modal ekonomi, sosial, budaya dan simbolik. Dinasti politik ini muncul dalam pemerintahan tidak terlepas karena adanya beberapa faktor seperti berikut, kekuasaan yang dijalankan terlalu kuat atau otoriter, undang undang yang tidak jelas berkaitan dengan politik dinasti, kelembagaan partai politik yang masih belum demokratis, biaya politik yang mahal, dan demokrasi yang masih buruk (Amalia Syauket, 2021).

Faktor - faktor dinasti politik diatas merupakan akumulasi dari masih buruknya tatanan demokrasi di Indonesia, hal ini selaras dengan fenomena pilkada tahun 2020 yang menunjukkan bahwasanya fenomena politik dinasti di daerah sangat buruk. Bahkan lebih dari 124 daerah terpapar indikasi dinasti politik dari jumlah tempat pemilihan sebanyak 270 daerah, lebih buruknya lagi pada pemilihan legislatif 2019 71,25% daerah pemilihan terpapar dinasti politik atau sekitar 17,22% anggota DPR RI adalah bagaian dari dinasti politik. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan praktik dinasti politik di Indonesia masih kurang dan mewajarkan kegiatan tersebut karena pemahaman akan politik yang masih minim dan minimnya pencerdasan politik ke masyarakat (Amalia Syauket, 2021).

Fenomena dari praktik dinasti politik banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti yang terjadi diwilayah Provinsi Banten yang terkenal dengan

keluarga Ratu Atut Chosiah. Dimana keluarga Ratu Atut ini berhasil memainkan peran politik yang besar dan juga menempatkan berbagai struktur keluarganya dalam berbagai posisi penting di pemerintahan provinsi dan kabupaten ataupun kota yang ada di wilayah Banten, baik itu dalam lembaga eksekutif ataupun dalam lembaga legislatif, hal ini tidak terlepas dari sejarah terbentuknya Provinsi Banten dan peran besar orang tua Ratu Atut yaitu Tubagus Chasanah Shohib. Selain di wilayah Provinsi dinasti politik juga terjadi di wilayah Kabupaten atau Kota seperti di wilayah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dimana mantan Bupati Aang Hamid Suganda yang jabatannya diteruskan oleh istri beliau kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang menjadi wakil bupati (Sukri, 2020).

Berdasarkan data dan juga fenomena diatas, indikasi dinasti politik juga terjadi di pemerintahan Desa Sumpinghayu bahwa regenerasi kepemimpinan dari satu keluarga, penempatan keluarga dalam posisi yang strategis memang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan, pertama Kepala Desa saat ini Bapak Sanen yang berkuasa selama 3 periode dari tahun 2007 sampai sekarang merupakan keturunan dari kepala desa Sumpinghayu sebelumnya yaitu bapak Ormat Natsir dan Suwar, kemudian perangkat desa juga di tempati oleh jajaran dari kepala desa, seperti Ketua Badan Pengawas Desa (BPD) yang bernama bapak Darus merupakan saudara dari kepala desa, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dijabat oleh istri kepala desa yang bernama ibu Siti Rohmah beliau juga menjabat sebagai ketua pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Sumpinghayu setelah menjadi istri Kepala Desa.

Jabatan lain yang dijabat oleh keluarga Kepala Desa yaitu Kasi Pelayanan yang dijabat oleh bapak Karno selaku kaka kandung dari kepala desa, Kaur Keuangan yang dijabat oleh ibu Daryati selaku adik ipar kepala desa sekaligus mantan pesaing beliau pada saat pemilihan kepala desa tahun 2019, Kaur Pemerintahan yang saat ini dijabat oleh ibu Nengsih yang merupakan anak dari bapak Karno Kasi Pelayanan, Staf Kaur Pembangunan dijabat oleh ibu Melasari yang merupakan istri dari bapak Darus Ketua BPD, Ketua Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Desa (LPPMD) desa yaitu bapak Tasrip keponakan kepala desa, wakil kepala LPPM bapak Nanta adik ipar kepala desa, sekertaris LPPMD bapak Kartono, kepala Dusun Kaduluhur ibu Wila Puspitasari merupakan saudara kepala desa, dan sisa nya pejabat yang mengisi jabatan struktural di pemerintahan desa adalah orang orang terdekat dan kepercayaan dari kepala desa<sup>6</sup>.

Kepala Desa Sanen mempertahankan kekuasaanya dalam menjalankan politik di desa sumpinghayu dengan melakukan upaya seperti menciptakan calon bayangan sebagai saingannya dalam pemilihan kepala desa tahun 2019<sup>7</sup>, calon bayangan nya ini adalah adik ipar kepala desa yang bernama Daryati, sedangkan dalam bidang keuangan sebagai modal ekonomi sanen memang termasuk ke dalam masyarakat golongan menengah ke atas sehingga ia mampu mengkombinasikan kekayaannya untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan yang saat ini sedang di jalankan. Dalam upaya untuk mempertahankan dan mendapatkan kekuasaan melalui modal simbolik sanen memang memiliki modal ini, dimana

---

<sup>6</sup> Data diperoleh dari struktur pemerintahan Desa Sumpinghayu

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Kusmara panitia pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018

beliau adalah aktor politik yang telah memiliki kehormatan dan juga reputasi yang baik melalui pendidikan yang telah diraih nya pada saat pertama mencalonkan kepala desa, sedangkan kehormatan yang beliau raih yaitu melalui status dari keturunan kepala desa sebelumnya dan keluarga besar beliau yang memiliki peran di masyarakat. Sedangkan dalam modal budaya sanen berhasil mengakulturasikan keterampilan dan kemampuan beliau dalam menjalin relasi dan meningkatkan citra politiknya dalam budaya yang berkembang di masyarakat untuk mempertahankan kekuasaanya.

**Gambar 1.1 Struktur Pemerintahan Desa Sumpinghayu**



**Sumber:** Kantor Kepala Desa Sumpinghayu dari Kasi Kesejahteraan

karmo

Berdasarkan data dan juga tabel di atas, dalam proses perekrutan pejabat di dalam pemerintahan Desa Sumpinghayu ketika ada kekosongan jabatan di pemerintahan desa karena pensiun atau lainnya, sejak tahun 2019 atau periode ke 3 pemerintahan bapak Sanen di Desa Sumpinghayu memang sudah dilakukan secara terbuka, dan juga disampaikan kepada masyarakat melalui pamflet yang disebar di setiap tempat keramaian seperti warung ataupun melalui pamflet yang dipasang di balai desa, hal ini terjadi mengingat sejak 2019 seiring kemajuan yang juga masuk di dalam pemerintahan desa dan masyarakat Desa Sumpinghayu, maka bentuk dan cara yang dilakukan dalam proses pemberitahuan informasi berkaitan dengan adanya lowongan jabatan dengan cara yang dibuat semenarik mungkin.

Meningkatnya citra positif yang ada di dalam pemerintahan desa terutama berkaitan dengan nilai gaji yang di dapat, maka fenomena generasi muda untuk masuk pemerintahan desa semakin diminati terutama mereka yang memiliki ijazah lulusan SMA ataupun SI hal ini diperparah dengan minim nya lowongan pekerjaan sehingga masuk kedalam pemerintahan desa adalah suatu solusi<sup>8</sup>. Dibanding sebelumnya karena proses gaji dan juga tunjangan yang di anggap minim serta terkendala dengan aturan izajah maka masyarakat masih belum begitu paham dengan jabatan dan posisi yang ada di pemerintahan desa. Contoh dari proses rekrutmen terbaru yang dimenangkan oleh keluarga kepala Desa adalah ibu Nengsih selaku Kaur Pemerintahan pada tahun 2024.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan surwenda wardani mantan pendaftar kaur yang belum berhasil

Masyarakat Desa Sumpinghayu menurut data pada tahun 2020, berkaitan dengan latar belakang Pendidikan menunjukkan bahwa mereka yang memiliki latar belakang Pendidikan dengan strata lulusan SD sebagai masyarakat mayoritas dengan persentasi mencapai lebih dari 74% dari jumlah penduduk yang bersekolah di susul oleh masyarakat yang lulusan SLTP sebanyak 16%, masyarakat yang lulus SLTA sebanyak 6% lebih, sedangkan untuk masyarakat yang lulus dengan gelar S1 yaitu sebanyak 1,7%, dan untuk generasi tua atau generasi terdahulu itu masih banyak yang tidak lulus sekolah dasar (SD). Sedangkan untuk pekerjaan mayoritas masyarakat Desa Sumpinghayu sebagai petani ataupun wirausaha dengan menjadi pedagang di luar kota, dimana komposisi usia penduduk di desa sumpinghayu juga dominan berada dalam masa produktif<sup>9</sup>.

Berdasarkan fenomena di atas masyarakat desa sumpinghayu sebetulnya masih memiliki permasalahan di dalam proses pendidikan politik, walaupun sosialisasi dan juga pendampingan dari pihak pemerintahan desa sudah dilakukan dengan beberapa upaya seperti sosialisasi ketika menjelang pemilu ataupun dalam ruang - ruang musyawarah desa, masyarakat desa sering di ajak juga dalam proses perencanaan ataupun dalam proses penentuan apa yang akan dilaksanakan seperti dalam musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDES) walaupun tidak semua masyarakat di ajak dalam proses tersebut tetapi berbagai perwakilan tiap dusun dan tokoh masyarakat dihadirkan.

Dalam ruang lingkup politik di masyarakat Desa Sumpinghayu, dalam partisipasi kegiatan pemilihan tergolong cukup baik karena mereka yang berada di

---

<sup>9</sup> Data diperoleh dari situs resmi milik pemerintahan provinsi Jawa Tengah SIDesa



ruang lingkup desa dan tidak sedang merantau pasti akan mengikuti proses politik yang sedang berlangsung. Seperti pada pemilihan Presiden tanggal 14 Februari tahun 2024 masyarakat Desa Sumpinghayu dengan angka partisipasi cukup tinggi dimana dari data daftar pemilih tetap atau (DPT) yang berjumlah 895 orang dari 05 tempat pemungutan suara (TPS) yang menggunakan hak suaranya sebanyak 680 orang atau 76,04% partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden tersebut. Walaupun data tersebut masih dibawah angka nasional sebanyak 81,78%, tetapi hal lainnya yaitu berkaitan dengan angkan suara tidak sah yang sangat kecil yaitu sebesar 0,89% atau hanya 8 orang saja yang masih salah dalam menggunakan hak pilihnya, dan yang tidak menggunakan hak pilihnya yaitu 215 orang atau sebanyak 24,02%<sup>10</sup> mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan beberapa faktor seperti masyarakat yang sedang tidak ada di kampung halaman karena sedang merantau dan juga mereka yang berusia lanjut karena faktor kesehatan sudah tidak memungkinkan.

Berdasarkan fenomena dan juga proses politik di atas berkaitan dengan dinasti politik sebelumnya juga pernah di teliti oleh peneliti terdahulu seperti dalam penelitian (Windi, 2017) tentang fenomena dinasti politik di pemerintahan desa, bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan oleh salah satu keluarga sebagai aktor politik terjadinya politik dinasti di desa Kancilan. Terjadinya politik dinasti yaitu karena adanya kemampuan untuk memproduksi basis sumber daya yang ada. Begitupula dengan penelitian(Siregar et al., 2021),(Marzuki & Munandar,

---

<sup>10</sup> Data dari situs resmi KPU tentang data Pemilihan Presiden tahun 2024 per TPS di Desa Sumpinghayu

2024),(Setiawan & Samosir, 2024) yang menjelaskan tentang dinasti politik muncul dan bertahan dikarenakan beberapa faktor seperti modal yang besar terutama modal ekonomi sehingga mempermudah dalam mempertahankan dinasti politik karena memiliki sumber daya modal yang besar terutama dari modal ekonomi, dinasti politik pada penelitian ini menunjukkan dampak yang buruk dimana politik desa hanya berputar disatu keluarga sehingga menghambat ruang demokrasi, selain itu adanya faktor keterikatan dengan kepala desa sebelumnya juga menjadi modal yang mumpuni untuk menjadi kepala desa.

Kekuasaan yang dibangun oleh kepala desa dan keluarganya mendapatkan citra politik yang baik. Sehingga hal ini menimbulkan persepsi politik yang baik dan kepercayaan dari masyarakat sehingga memudahkan dalam membentuk dinasti politik, hal ini sesuai dengan penelitian (Pahrudin, 2018), (Mirsa & Imran, 2023). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh(Ramadani et al., 2020), menjelaskan tentang usaha kepala desa untuk terus meneruskan garis kekuasaan kepada keluarganya walaupun dengan cara yang dianggap demokratis, selain itu juga karena adanya dukungan modal yang besar serta adanya rasa kekerabatan yang tinggi sehingga dinasti politik ini terus bertahan di desa Tangkit Baru.

Kekuasaan sebagai hasil akhir dari pelaksanaan politik seringkali di salahgunakan terutama oleh mereka yang melaksanakan praktik dinasti politik, dimana ini berakibat pada para pejabat yang sering kali mengabaikan peran dan fungsi sebagai pelayan masyarakat karena pemerintahannya berada dalam ruang lingkup keluarga, hal ini sesuai dengan penelitian dari (Widayanti, 2020), (Suta dan Supartha, 2017). Beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwasanya dinasti politik

memang selalu dibarengi dengan adanya modal yang cukup terutama modal sosial untuk mempertahankan dan mendapatkan kekuasaan yang berkala dan langgeng, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan lebih mengedepankan kepada bagaimana seluruh modal politik ataupun kekuasaan dari Bourdie ini mampu memengaruhi dan mempertahankan kekuasaan kepala desa selama tiga periode dan membentuk dinasti politik.

Fenomena dinasti politik di Desa Sumpinghayu ataupun pada penelitian sebelumnya, tidak bisa dipisahkan dalam konteks kekuatan modal yang dimiliki oleh aktor politik. Hal tersebut sesuai dengan teori modal yang dijelaskan oleh Pierre Bourdieu yaitu menyatakan bahwa modal sebagai keseluruhan sumber daya, baik yang aktual ataupun potensial, ini berkaitan dengan hubungan relasi yang dipertahankan berdasarkan pada kelembagaan yang saling berkait dan mengakui, yang didalamnya terdapat empat macam bentuk modal yaitu modal sosial, modal ekonomi, modal budaya atau kultur, modal simbolik ke empat modal ini sebagai sumber yang baik dalam mencapai kekuasaan (Nurnazmi & Siti Kholifah, 2023) .

Sedangkan akhir dari sebuah proses politik yang dilakukan oleh Kepala Desa Sumpinghayu yaitu mendapatkan kekuasaan dengan berbagai upaya dan cara, hal ini selaras dengan teori kekuasaan elite yang di gagas oleh Haryanto menjelaskan tentang kekuasaan sebagai hak untuk melakukan atau berindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki nya, dan dapat dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan hegemoni ataupun pengaruh yang dapat terus dipertahankan oleh sebagian elite kecil terhadap sebagian mayoritas masyarakat (Haryanto, 2017).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan permasalahan menjadi pertanyaan dalam penelitian ini mengenai: “Bagaimana Modal Kekuasaan Kepala Desa Sumpinghayu dalam Membentuk Dinasti Politik Di Pemerintahan Desa Sumpinghayu Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana modal kekuasaan dalam membentuk terjadinya dinasti politik di pemerintahan Desa Sumpinghayu Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap oleh Kepala Desa Sanen.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga memperkaya literatur akademik berkaitan dengan bagaimana masih eksisnya dinasti politik ditengah menguatnya sistem demokrasi yang lebih transparan dan tata kelola pemerintah yang langsung diawasi oleh masyarakat.
- b. Penelitian ini juga sebagai sumbangan pengetahuan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Politik terkait tentang dinasti politik.

#### **1.4.2 Manfaat Secara Praktis**

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi para peneliti yang ingin meneliti berkaitan dengan bagaimana dinasti politik terus tumbuh dan berkembang di dalam lingkup pemerintahan desa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk meminimalisir kejadian serupa berkaitan dengan penggunaan modal dalam membentuk dinasti politik.